

Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Bus Damri Kota Bandung

Skripsi

Oleh Hawwa Hafizha Rana 2012310006

Bandung 2017



Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Bus Damri Kota Bandung

Skripsi

Oleh Hawwa Hafizha Rana 2012310006

Pembimbing
Dr. Pius Sugeng, M.Si.

Bandung 2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama

: Hawwa Hafizha Rana

Nomor Pokok

: 2012310006

Judul

: Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Bus DAMRI Kota

mdydin

Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana Pada 7 Agustus 2017 Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si.

Sekretaris merangkap pembimbing

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si.

Anggota

Dr. Indraswari, M.A.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Hawwa Hafizha Rana

NPM

: 2012310006

Program Studi

: Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi

: Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Bus Damri Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Agustus 2017

Hawwa Hafizha Rana

ABSTRAK

Nama : Hawwa Hafizha Rana

NPM : 2012310006

Judul : Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Bus DAMRI Kota Bandung

Pelayanan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan seseorang. Tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu pelayanan dapat diukur dengan membandingkan antara harapan konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diinginkan dengan apa yang diterima atau dirasakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepuasan konsumen terhadap pelayanan jasa yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan lima dimensi, yaitu access and facilities, cost, responsiveness, cleanliness, dan security.

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan kepada konsumen dan sebagai sarana pengembangan dan penyaluran ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, kajian dokumen, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen mendapatkan kepuasan terhadap jasa yang diberikan oleh Pemerintah, hanya saja mereka kurang puas pada dimensi access and facilities, cleanliness, dan security.

Kata kunci: Pelayanan, kepuasan konsumen.

ABSTRACT

Name : Hawwa Hafizha Rana

NPM : 2012310006

Title : Analysis of Service Quality at DAMRI Bus Service in Bandung

Service can be said as an action to meet what a person's needs and wants. The level of customer satisfaction with a service can be measured by comparing the expectation of the consumers to the desired service quality with what is received or perceived. This study aims to find out how customer satisfaction on services provided by the Government based on five dimensions, access and facilities, cost, responsiveness, cleanliness, and security.

The benefits of this study are to evaluate the services that have been given to consumers and as a means of development and distribution of science. The research method used is qualitative research. Data collection techniques used were interviews, review of documents, and observation.

The results show that consumers get satisfaction on services provided by the Government, but they are less satisfied on the dimensions of access and facilities, cleanliness, and security.

Keywords: Service, customer satisfaction.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-NYA sehingga skripsi yang berjudul "Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Bus Damri Kota Bandung" dapat tersusun hingga selesai. Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis berharap apa yang tertulis dalam makalah ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan bisa memberikan nilai – nilai positif bagi yang sudah membacanya. Selain itu, penulis sadar dalam menyusun skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar penelitian ini dapat menjadi jauh lebih.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

- Dr. Pius Sugeng Prasetyo M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan membimbing dengan sabar selama proses penulisan skripsi.
- Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Program
 Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

• Kristian Widya Wicaksono, S.Sos.M.Si., selaku Sekretaris Program Studi

Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Segenap dosen pengajar, staf pelaksana, serta seluruh keluarga besar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Winda Adistika dan Achdiat Purwantoro, selaku Ibu dan Ayah yang

selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral dan materi yang tak

terhingga.

• Zanna Aziza dan Arkan Aziz, selaku adik yang telah memberikan

dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

• Annisa Prianka, sahabat yang selalu membantu, mendoakan, memberikan

motivasi, dan memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan

skripsi.

• Novenda Dwi Andari, teman seperjuangan dalam penulisan skripsi yang

selalu membantu dalam banyak hal.

• Teman dan keluarga besar Administrasi Publik dan FISIP Unpar.

• Pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi dan tidak dapat

disebutkan satu persatu.

Bandung, 17 Juli 2017

Hawwa Hafizha Rana

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2 KERANGKA TEORI	9
2.1 Pelayanan Publik	9
2.2 Kepuasan Klien	10
2.3 Kepuasan Klien atas Pelayanan Publik	11
2.4 Variabel Pengukuran Kepuasan Klien	12
2.5 Model Penelitian	16
BAB 3 METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Metode Penelitian	18
3.3 Lokasi Penelitian	20
3.4 Informan	20
3.5 Teknik Pengumpulan Data	20

3.6 Instrumen Penelitian			
BAB 4 OBJEK PENELITIAN	24		
4.1 Sejarah DAMRI	23		
4.2 Visi dan Misi DAMRI	24		
4.3 Tujuh Karakteristik Insan DAMRI	25		
4.4 Struktur Organisasi	29		
4.5 Peta Trayek Bus DAMRI			
BAB 5 HASIL PENELITIAN	31		
5.1 Karakteristik Informan	31		
5.2 Deskripsi Informan			
5.3 Hasil Penelitian			
5.3.1 Hasil Observasi Partisipan	34		
5.3.2 Kualitas Pelayanan Bus DAMRI	36		
a. Dimensi Access and Facilities (Akses dan Fasilitas)	36		
b. Dimensi Cost (Biaya)	41		
c. Dimnensi Responsiveness (Tanggapan)	44		
d. Dimensi Cleanliness (Kebersihan)	46		
e. Dimensi Security (Keamanan)	49		
5.3.3 Kepuasan Pengguna Bus DAMRI	51		
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	56		
6.1 Kesimpulan	56		
6.2 Saran	57		
DAFTAR PUSTAKA	59		
LAMPIRAN	61		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.4.1	:	29
Gambar 4.5.1	:	30
Gambar 4.5.2	:	30
Gambar 5.2.1	:	41
Gambar 5 2 2		49

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu pelayanan publik yang disediakan oleh aparatur pemerintah terhadap masyarakat yaitu dalam hal pelayanan transportasi. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dalam memberikannya. Pelayanan tersebut dapat berupa barang maupun jasa. Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009, dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara dalam KEMENPAN No. 63 Tahun 2003, menjelaskan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang No 25 Tahun 2009, disebutkan beberapa tujuan dari pelayanan publik, antara lain:

- Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- 3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Seperti yang sudah diketahui, DAMRI merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat. Di Kota Bandung, DAMRI menjadi alat transportasi yang sering digunakan oleh sebagian warganya. Bukan hanya bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan saja, tetapi warga yang memiliki kendaraan pun kerap menggunakan jasa transportasi ini. Karena tarif bus DAMRI yang dianggap lebih murah dibandingkan dengan angkutan umum biasanya yang bisa mencapai dua kali lipatnya.

Pada tahun 2015 lalu, Dinas Perhubungan Kota Bandung mengganti seluruh bus DAMRI yang lama dengan bus yang baru. Hal ini dikarenakan bus – bus yang terdahulu dinilai sudah sangat tidak layak untuk beroperasi dan tidak memberikan

kenyamanan bagi para pengguna, maupun lingkungan sekitar. Contoh dari ketidaklayakan tersebut dapat dilihat dari banyaknya kursi penumpang yang rusak, jendela dan pintu yang sudah tidak berfungsi dengan baik, atap yang bocor, menaikkan penumpang lebih dari yang seharusnya, hingga knalpot bus yang mengelurkan asap hitam yang mengganggu lingkungan. Hal — hal tersebut membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan/Perum DAMRI sangat tidak sesuai dengan tujuan pelayanan publik. Maka tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan ulah dari DAMRI tersebut.

Karena banyaknya keluhan dari masyarakat, sebagai Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dan Dinas Perhubungan dengan segara untuk mengganti armada – armada bus yang sudah tiak layak tersebut dengan yang baru. Bus DAMRI yang baru di buat untuk senyaman mungkin dan dilengkapi oleh *AC* dan *GPS*. Tak hanya itu, meskipun sudah bertambah bagus, tarif salah satu trayek dari bus DAMRI justru di turunkan oleh Perum DAMRI Cabang Bandung dan Ridwan Kamil memberlakukan program bus DAMRI gratis untuk seluruh pelajar di Kota Bandung¹. Pada bulan Juli 2016 lalu, Perum DAMRI Cabang Bandung mendapat bantuan tambahan bus DAMRI sebanyak 165 unit bus².

Akan tetapi, meskipun seluruh bus DAMRI telah diganti dan diperbaharui, bukan berarti tidak menimbulkan masalah yang baru. Bus DAMRI dinilai sebagai salah satu penyebab terjadinya kemacetan di Kota Bandung. Karena sopir bus

¹ Info Bandung. 'Bus Damri Tua di Bandung Diganti, Tarifnya Turun.' http://infobandung.co.id/bus-damri-tua-di-bandung-diganti-tarifnya-turun/ (5.3.15).

_

² S-M, Tiah. (2016). Kabar Gembira, Kota Bandung Dapat Bantuan 165 Bus Baru yang Akan Dioperasikan Perum DAMRI. Diperoleh dari http://jabar.tribunnews.com/2016/06/09/kabar-gembira-kota-bandung-dapat-bantuan-165-bus-baru-yang-akan-dioperasikan-perum-damri.

yang menaikturunkan penumpang di sembarang tempat. Sehingga halte yang telah disediakan tidak dimanfaatkan dengan baik, membuat halte menjadi kotor, tidak terurus, dan digunakan oleh para gelandangan untuk menjadi tempat tidur mereka³.

Dengan demikian, untuk mengetahui bagaimana respon dan tingkat kepuasan dari masyarakat mengenai pergantian armada bus DAMRI ini, Unit Pelayanan Instansi Pemerintah diharapkan untuk menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Selain untuk mengetahui respon dari masyarakat sendiri, IKM juga berguna untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan dan sebagai acuan dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat⁴.

Menurut KEMENPAN Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pedoman penyusunan IKM dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

_

³ Pikiran Rakyat. (2016). Menyoal Transportasi & Kebersihan di Kota Bandung. Diperoleh dari http://www.pikiran-rakyat.com/surat-pembaca/2016/06/28/menyoal-transportasi-kebersihan-di-kota-bandung-373150.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

selanjutnya. Sasaran dari IKM yaitu tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan prinsip pelayanan yang telah ditetapkan dalam KEMENPAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi empat belas unsur yang relevan dan reliabel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

- Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- 2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- 3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggungjawabnya)
- 4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku
- 5. Tanggungjawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan
- 6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat
- 7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan

- 8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani
- 9. Kesopanan dan keramahan petugsa, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati
- Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan
- Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan
- 12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- 13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan
- 14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Manfaat dari tersedianya data IKM secara periodik itu sendiri yaitu:

- Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik,

- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
- 4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
- 6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka beberapa permasalahan yang akan di bahas yaitu:

- Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Perum DAMRI
 /Dinas Perhubungan?
- 2. Bagaimana tingkat kepuasan para pengguna bus DAMRI terhadap pelayanan yang telah diberikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- Untuk mengetahui tingkat kepuasan dari para pengguna DAMRI terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah.
- Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang di dapat oleh pengguna bus DAMRI.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini yaitu dengan harapan dapat memberikan informasi dan masukan bagi Dinas Perhubungan dan Kepala Perum DAMRI mengenai kepuasan pengguna bus DAMRI di Kota Bandung terkait dengan pelayanannya.

Sementara itu, secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan membatu untuk menjadi referensi bagi para mahasiswa yang melakukan penelitian dengan topik yang sama.